

Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Gampong Dalam Mewujudkan Good Governance Di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara

Teuku Muzaffarsyah^{1*}, Bobby Rahman², Zuhilmi³, Taufik Abdullah⁴, Muhammad Bin Abu Bakar⁵, Dahlan A Rahman⁶, Dermawan⁷, Ikhlusal Absor⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Malikusaaleh, Lhokseumawe, Aceh

* Corresponding Author: tmuzaffarsyah@unimal.ac.id

Abstract. Tata kelola pemerintahan yang baik mampu membangkitkan pelayanan publik yang berintegritas tinggi di desa. Tata kelola pemerintahan gampong harus dipahami secara utuh oleh masyarakat sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Tentunya peran dari masyarakat dalam mewujudkan *good governance* sebagai sebuah hal yang perlu dilakukan sehingga masyarakat dalam proses pelayanan administrasi Gampong bisa berjalan maksimal. Kegiatan pengabdian ini diprioritaskan kepada perangkat Gampong dan unsur-unsur terkait, sebagai modal mereka dalam mengembangkan potensinya terkait tata kelola pemerintah Gampong dalam mewujudkan *good governance*. Metode dan pendekatan yang dilakukan dalam pengabdian ini dengan kegiatan observasi dengan mengidentifikasi masalah, pengenalan tentang tata kelola pemerintahan (*good governance*), pemberian informasi mengenai tata kelola pemerintahan, partisipasi aparatur gampong dalam mewujudkan *Good Governance*, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa antusias elemen-elemen yang ada di Gampong Paya Terbang yang memerlukan pengetahuan tentang Tata kelola Pemerintahan Gampong. Penguatan kapasitas aparatur gampong di Paya Terbang cenderung memberikan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tentunya kegiatan ini dapat menjadi kontribusi yang positif bagi masyarakat dan aparatur Gampong di Paya Terbang sehingga kegiatan ini dapat menjadikan Gampong Paya Terbang sebagai Gampong percontohan tata kelola pemerintahan Gampong yang optimal bagi gampong-gampong lain di Kecamatan Samudera dan Kabupaten Aceh Utara.

Keyword: Pelatihan, Tata Kelola, Pemerintahan, Paya Terbang, Good Governance

1. Pendahuluan

Aspek yang paling penting adalah pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang berkarakter dalam mewujudkan *Good Governance* merupakan sebuah proses yang perlu dilakukan. Hal ini berkaitan membentuk karakter kemandirian desa dalam dimensi pembangunan disegala bidang bagi masyarakat. Perubahan karakter masyarakat yang maju dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik mampu membangkitkan pelayanan publik yang berintegritas tinggi di desa. Aceh sebagai Provinsi yang memiliki kewenangan pemerintahan dan juga adanya Otonomi Khusus menjadikan pelaksanaan pemerintahan harus maksimal dijalankan. Tentunya Aceh harus memberikan kemandirian bagi wilayah pedesaan dalam memberi pemahaman bagi masyarakat pada tata kelola pemerintahan Desa (Gampong).

Tata kelola pemerintahan Gampong harus dipahami secara utuh oleh masyarakat sehingga terciptanya melek politik dan aktifnya partisipasi politik. Tentunya peran dari masyarakat dalam mewujudkan *good governance* sebagai sebuah hal yang perlu dilakukan sehingga animo masyarakat dalam proses politik desa bisa berjalan maksimal. Tentunya tata kelola yang baik mampu diwujudkan jika masyarakat aktif dalam proses tata kelola pemerintah Gampong.

Aspek Pelayanan Publik juga terkait dengan pengelolaan objek pariwisata yang menguntungkan bagi masyarakat seperti pengabdian yang dilakukan oleh Bobby Rahman, Rasyidin, Teuku Muzaffarsyah dan Zuhilmi dimana dalam aspek pelayanan belum memadai terkait sarana dan prasarana yang seharusnya dirasakan oleh pengunjung. Hal ini yang membuat kon sep pelayanan pada situs Guha Jepang belum maksimal bagi para pengunjung atau wisatawan (Bobby et al., 2021). Jika melihat pada pelayanan publik juga tergambar pada aspek kebijakan dalam penanganan pandemi Covid 19. Dalam hal ini juga terlihat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam menangani pandemi Covid 19 melalui mekanisme pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maka perlu adanya pelaksanaan yang optimal yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan sepihak dari pemerintah daerah bisa terjadi bila koordinasi yang dilakukan terhadap pemerintah daerah tidak maksimal. Pemerintah pusat Dalam hal ini memunculkan perbedaan persepsi kebijakan ditingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah memberi peluang akan terciptanya koordinasi baik (Zuhilmi et al., 2021).

Selain aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat juga harus terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Paya Terbang. Maka pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan di Paya Terbang memberi peluang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi serta terwujud harapan dari masyarakat. Tentu hal ini merupakan sebuah strategi dalam mengembangkan potensi Gampong Paya Terbang secara umum dalam memberdayakan tenaga dan pemikiran masyarakat dalam tata kelola pemerintahan Gampong. Hubungan antara perangkat mulai dari unsur Tuha Peut, Pemerintah Gampong, Perangkat Gampong maupun diluar struktur pemerintah Gampong di Paya Terbang harus berjalan selaras dalam mewujudkan *good governance*. Maka diperlukan keterlibatan aktif dalam membangun potensi Gampong menjadi mandiri dan akuntabel. Hal ini yang dapat menjadi respon yang baik dari masyarakat dalam aspek pembangunan baik perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai.

Aspek pelayanan yang berkualitas serta keterlibatan public dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Gampong Paya Terbang serta memiliki perencanaan

yang feksibel dan akuntabel. Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan dan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Layanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Simamora, 2014). Pelayanan adalah produk melibatkan usaha produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang usaha manusia menggunakan peralatan (Atiek Septi & Ratminto, 2012).

Jadi Tata kelola Pemerintahan Gampong juga memberikan gambaran semakin berkualitasnya kinerja pemerintahan Gampong Paya terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Namun hal sebaliknya belum adanya pemahaman yang sangat baik terkait tata kelola pemerintah Gampong di Paya Terbang. Masalah yang muncul adalah kualitas pelayanan dan juga kemampuan dalam mengelola pemerintahan serta kurangnya keahlian dalam mengelola informasi di website Gampong sehingga informasi yang diterima kurang berimbang. Padahal Gampong Paya Terbang tidak termasuk kategori desa tertinggal dan masih bisa menjangkau koordinasi pemerintahan dengan pihak Kecamatan Samudera walaupun jauh jaraknya dengan pusat administrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Selain itu terkait dengan pelayanan bagi masyarakat juga bagian dari tata kelola pemerintah Gampong Paya Terbang.

1.2. Permasalahan yang Dihadapi Mitra

Berdasarkan uraian situasi terkait dengan tata kelola Pemerintahan Gampong Paya Terbang di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara maka Pengabdian ini mengemukakan beberapa poin permasalahan yang muncul dari mitra yaitu:

1. Aspek Tata kelola Pemerintahan kurang dipahami secara utuh oleh komponen masyarakat yang ada di Gampong Paya Terbang dalam wujud tata kelola pemerintahan.
2. Kurangnya pemahaman pemerintahan Gampong Paya Terbang terhadap Tata Kelola pemerintahan dalam mewujudkan Good Governance.
3. Masyarakat tidak memahami tentang konsep pembangunan dalam tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera di Kabupaten Aceh Utara.
4. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran adalah Pemerintahan Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera di Kabupaten Aceh Utara.
5. Sasaran adalah perangkat Pemerintahan dan masyarakat Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera di Kabupaten Aceh Utara.

2. Metodologi Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam melakukan pendampingan melalui pelatihan Tata Kelola pemerintahan Gampong dalam mewujudkan Gampong *Good Governancedi* Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Maka ada beberapa tahapan yang akan dilakukan yaitu:

- a. Pra Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada saat melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pra pelaksanaan kegiatan maka diperlukan observasi situasi lokasi pengabdian sehingga didapatkan kriteria yang menjadi dasar penilaian masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbang di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, atau bukti fisik yaitu kemampuan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Artinya penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dalam aspek tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbang.

b. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengenalan Tentang Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

Pendekatan yang dilakukan meliputi aspek metode pendekatan yang akan dilakukan terhadap mitra meliputi proses tahapan pengenalan tentang tata Kelola pemerintahan yang Baik. Mewujudkan konsep *Good Governance* memerlukan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya transformasi dari jenis hubungan dimana menjalankan pemerintahan dalam rangka untuk memenuhi yang diperlukan oleh warga masyarakat. *Good Governance* bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih dekat dengan masyarakat dengan berpartisipatif menyuarakan pendapat dan mengurangi penyelewengan anggaran dan memastikan bahwa keputusan dan proses pelaksanaannya terbuka dan mudah dimengerti (Norman et al., 2020).

Pemerintahan yang baik atau *Good Governance* ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berhubungan. Tiga elemen tersebut yakni partisipatif, transparansi dan akuntabilitas (Sabaruddin, 2015). Konsep tersebut terdapat pelaksanaan pemerintahan yang ideal dalam mewujudkan akuntabilitas. Maka wujud nyata *Good Governance* mampu memberikan kontribusi serta adanya apresiasi dari masyarakat di Gampong Paya Terbang. Maka pelatihan yang dilaksanakan ini diharapkan mampu melancarkan program pengabdian kepada masyarakat di Gampong Paya Terbang sehingga dapat berjalan optimal dan pengembangan pemahaman tentang pelayanan administrasi pemerintahan Gampong di Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.

Idealnya tata kelola pemerintahan Gampong dimulai dengan pelayanan yang praktis, efisien dan akuntabel. Hal ini dapat diwujudkan ketika aparatur Pemerintahan Gampong Paya Terbang paham tentang pelayanan yang prima bagi public. Maka pelaksanaan kegiatan ini diperlukan dengan melibatkan para aparatur pemerintahan Gampong di Paya Terbang mulai dari unsur Keuchik dan jajarannya (eksekutif Gampong) dan Tuha Peut (legislatif Gampong) serta masyarakat umum. Hal ini dilaksanakan dalam melihat sinerjitas pada pelayanan administrasi di pemerintahan Gampong Paya Terbang yang dilakukan bagi masyarakat supaya dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran.

2. Pemberian Informasi mengenai Tata Kelola Pemerintahan

Informasi penting untuk diberikan pada Mitra dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*good governance and clean government*). *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik).

Sejalan dengan hal tersebut governance sering diartikan sebagai ke pemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2012).

Memberikan informasi bagi masyarakat tentang tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbang. Makadapat membentuk potensi sumber daya yang mampu mengelola pemerintahan Gampong perlu adanya pendampingan. Tentunya aspek pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan teknis terkait dengan pemahaman Tata Kelola pemerintahan yang baik atau disebut *Good Governance*. Hal ini dilakukan untuk memberikan solusi bagi permasalahan mitra terkait dengan pembinaan gampong Paya terbang dalam meningkatkan pemahaman tentang tata kelola pemerintahan gampong menuju Gampong *Good Governance*. Kegiatan ini dilakukan setelah adanya pemahaman dasar tentang pengembangan tata kelola pemerintahan gampong menuju Gampong *Good Governance* sehingga bisa maksimal pada saat diadakan pengujian melalui penyuluhan dan pelatihan mengenai *Good Governance*. sehingga mampu menghasilkan sebuah kinerja yang efektif dan efisien dalam agenda pengembangan tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbang.

3. Partisipasi Mitra dalam mewujudkan *Good Governance*.

Elemen-elemen pemerintahan gampong Paya Terbang diharapkan berpartisipasi dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai pelaksanaan dalam aspek tata kelola pemerintahan yang baik. Diharapkan partisipasi yang baik dalam pemberdayaan masyarakat ini mampu memberikan respon positif bagi masyarakat. Selanjutnya partisipasi mitra diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam dimensi social, budaya serta ekonomi. Inovasi dan kreativitas akan muncul dalam proses pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.

c. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat maka dilakukan proses pemantauan berkelanjutan dalam melihat perkembangan permasalahan mitra yang teratasi. Solusi yang ditawarkan juga akan bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas mitra dalam upaya melakukan pemberdayaan bagi masyarakat. Prinsip yang dianut dalam pemberdayaan masyarakat terkait penerapan tata kelola pemerintahan dalam dimensi *Good Governance*, selain berdaya guna, berhasil guna, dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa. Proses ini diharapkan berhasil dijalankan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini memberikan sebuah aspek solusi dalam menangani permasalahan terkait dengan tata kelola pemerintahan Gampong yang dikatakan menuju istilah *Good Governace*. Maka pelatihan tentang melakukan tata kelola pemerintahan Gampong di Paya Terbang agar sistematis dan dapat menjadi Gampong yang dapat terwujud *good governance* maka perlu adanya partisipasi semua elemen masyarakat di Gampong Paya Terbang. Proses kegiatan pelatihan dalam pengabdian kepada masyarakat di Gampong Paya terbang ini memberikan gambaran belum begitu paham elemen-elemen aparatur Gampong dalam melakukan tata kelola pemerintahan dengan mewujudkan *good governance* sehingga belum berjalan maksimal. Maka perlu kegiatan ini dilaksanakan dan pelaksanaannya sangat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi masyarakat

mengenai tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbang dalam menuju pemerintahan yang *good governance* secara simultan.

Sebelum kegiatan ada fenomena yang muncul di hari pertama pengabdian dimana tata kelola pemerintahan Gampong yang dilakukan belum maksimal. Hal ini nampak ketika adanya pelayanan yang belum praktis dan sering kali bersifat dinamis. Tentunya hal ini dirasa oleh masyarakat menjadi sulit dan memberikan pelayanan yang sangat stagnan dan cenderung buruk. Fenomena selanjutnya dalam transparansi juga belum begitu optimal dilakukan oleh pemerintah Gampong Paya Terbang sehingga akuntabilitas tidak nampak dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong. Tentu ini menjadi sebuah permasalahan yang harus disikapi bersama. Fenomena ini yang menjadi gambaran perlu adanya kegiatan pelatihan. Setelah memetakan permasalahan yang terjadi terkait dengan tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbang maka dilaksanakan pelatihan di hari kedua pada saat pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan dilakukan di Balai Desa di Gampong Paya Terbang dengan menghadirkan seluruh aparatur desa dengan jumlah peserta ada sekitar 40 orang diantaranya ada aparatur desa dan elemen masyarakat yang ada di Gampong Paya Terbang seperti ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Peserta Pelatihan

Peserta	Jumlah (Per-Orang)	Jabatan	Persentase
Aparatur Inti	6	Pimpinan dalam Pemerintahan	10,02
Aparatur Biasa	10	Jajaran Dalam Pemerintahan	20,00
Tokoh Perempuan	3	-	02,00
Tokoh Pemuda	5	-	10,00
Tokoh Masyarakat	4	-	08,00
Masyarakat Biasa	12	-	40,08
Jumlah	40		100,00

Data tersebut menunjukkan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan tentang tata kelola pemerintahan Gampong di Paya Terbang. Pada kegiatan tersebut dilakukan pelatihan yang dibimbing oleh para pemateri yang ekspert dibidang Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Semua perangkat pemerintahan Gampong hadir dan antusias dan juga dari perwakilan masyarakat juga hadir pada kegiatan masyarakat. Tentunya kegiatan pelatihan yang dilakukan sangat penting dan menumbuhkan kesadaran mereka akan tata kelola pemerintahan yang baik di Gampong Paya Terbang. Para peserta memahami banyak kekurangan dalam melakukan tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbang sehingga harus berfikir secara rasional dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Gampong Paya Terbang. Banyak hal yang ditemukan pada diskusi yang dilakukan pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh tim. Pelatihan ini banyak representasi dari berbagai elemen-elemen masyarakat yang berpartisipasi sehingga mampu menciptakan pelatihan yang penuh dengan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman tata kelola pemerintahan Gampong yang terjadi.

Gambar 1
Suasana Kegiatan Pelatihan di paya Terbang



Kegiatan tersebut memberikan sebuah pengetahuan dasar dalam melakukan tata kelola pemerintahan di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Proses jalannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan beberapa hari sehingga lebih memberi pemahaman terhadap aparatur pemerintahan Gampong Paya Terbang dalam melakukan tata kelola pemerintahan di level Gampong. Maka dapat dipahami bahwa setiap kegiatan selama 4 hari tersebut dapat memberikan sebuah pengetahuan baru yang dirasakan oleh seluruh elemen-elemen dalam pemerintahan Gampong Paya Terbang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga menghadirkan dari unsur pemerintah Kecamatan dan sekretariat daerah Kabupaten Aceh Utara. Pada dasarnya proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan sebuah peningkatan kapasitas perangkat pemerintahan dalam melakukan tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbang menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan akuntabel.

Pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kegiatan tersebut adalah dengan adanya pemahaman dasar tentang tata kelola pemerintah atau *governance*. Tentu saja hal ini menghasikan suatu *good governance and clean governance* sebagai hasil akhir dari kegiatan pengabdian ini. selain itu juga meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah Gampong dalam merumuskan atau melakukan perencanaan program-program pembangunan yang akan dilakukan di Gampong. Selain itu pengaruh terbesar dari kegiatan ini membuat Tuha Peut Gampong Paya Terbang mengetahui tupoksinya yaitu sebagai legislatif ditingkat Gampong. Mereka menyadari bahwa proses legislasi dapat membuat sebuah aturan-aturan dalam Gampong dan mengawasi jalannya pemerintah Gampong. Maka hal ini sangat perlu didampingi oleh tim pengabdian pada kegiatan pelatihan peningkatan pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbang. Berikut digambarkan pada tabel terkait jadwal kegiatan pengabdian di bawah ini.

Tabel 2

Jadwal kegiatan pelatihan Tata Kelola pemerintahan Gampong Paya Terbang

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Sosialisasi program Pengabdian Kepada Masyarakat terkait	30 Oktober 2023	Tim

	Kegiatan pelatihan		
2	Pelatihan Tentang Tata Kelola Website Desa	30 Oktober 2023	Dr. Dahlan A. Rahman, S.Ag., MA
	Pelatihan Tentang peningkatan Pemahaman tentang Tata Kelola Pemerintahan Gampong	30 Oktober 2023	Dr. Muhammad Bin Abubakar, B.HSc., MA
	Evaluasi Pelatihan dan diskusi terkait pelaksanaan kegiatan dan manfaatnya.	30 Oktober 2023	Tim

Pelatihan tersebut memberi gambaran bahwa tata kelola pemerintahan Gaamong Paya Terbang sangat penting untuk dibenahi dalam upaya meningkatkan pengetahuan terkait dengan cara pengelolaan pemerintahan yang *good governance*. Sehingga mempengaruhi para aparatur pemerintahan Gampong Paya Terbang dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Tata kelola yang dilakukan selama ini banyak menghadapi berbagai macam persoalan mulai dari lemahnya kedisiplinan pegawai aparatur pemerintahan Gampong Paya Terbang, selanjutnya penyusunan program pembangunan Gampong tidak melibatkan Tuha peut dalam upaya musyawarah, selain itu wadah informasi seperti website desa kurang di berdayakan oleh perangkat Gampong Paya Terbang. Maka pelatihan ini menyadarkan mereka untuk lebih aktif dalam proses jalannya tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbang sehingga dapat lebih efisien dan akuntabel dalam kinerjanya.

Kegiatan ini juga dapat memacu aparatur Gampong Paya Terbang untuk mulai membuat sebuah perencanaan pembangunan di Gampong dalam membentuk potensi sumberdaya yang ada baik manusia maupun fasilitas yang telah ada. Selain itu peluang untuk mngaktualisasikan diri sangat besar dalam memajukan Gampong Paya Terbang dengan konsep *good governance*. Berikut Gambaran Pelatihan yang dilakukan pendampingan terhadap peserta pelatihan di bawah ini.

Gambar 2

Pendampingan terkait kegiatan pelatihan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat





Pendampingan yang dilakukan oleh tim Pengabdian membuat para perangkat pemerintahan Gampong Paya Terbang dan masyarakatnya harus memulai tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam kerjanya. Selain itu Tuha Peut selaku legislatif Gampong mampu mengawasi serta merumuskan aturan-aturan dalam bentuk Qanun Qampong menjadi Reusam yang dapat ditaati oleh seluruh perangkat yang ada di Gampong Paya Terbang serta bersinergi dengan pemerintah Gampong dalam hal ini Keuchik dan jajarannya sebagai lembaga eksekutif Gampong. Hal ini dapat berjalan nantinya secara maksimal dan mampu mewujudkan Gampong Paya Terbang yang *good governace*.

Kegiatan memberikan sebuah aspek tata kelola pemerintahan yang solutif yaitu dengan meningkatkan kapasitas keuchik dan perangkat Gampong di Paya Terbang melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan studi banding agar mampu menciptakan konsep *good governance*. Kegiatan ini memberi dampak dalam meningkatkan pengetahuan tentang proses dan tahapan dalam melakukan tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbang. Tahapan awal dengan memberikan kesempatan sumber daya manusia potensial pada masyarakat yang dapat memahami tentang tata kelola pemerintahan Gampong di Paya Terbang. Harapan ndari kegiatan lebih kepada berbagai pengalaman sehingga dapat diterapkan di Gampong Paya Terbang. Kegiatan hari berikutnya lebih kepada penguatan kapasitas aparatur Gampong dalam memberikan peluang untuk beraktualisasi dalam proses berpemerintahan. Penyusunan Awal dengan dengan perbaikan soft skill dalam aspek tata kelola pemerintahan. tentunya peningkatan kapasitas dalam meningkatkan kinerja geuchik dan jajarannya. Daram aspek tata kelola pemerintahan Gampong

Tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbang setelah kegiatan akan mulai dijalankan. Maka proses ini menjadi rumit dan cenderung stagnan dan hal ini menjadi aspek yang terburuk dalam tata kelola Pemerintahan Gampong. Maka proses ini akan terus

berkelanjutan jika tidak diberikan pelatihan atau apa saja yang mampu meningkatnya pengetahuan para aparat Gampong pengenalan tentang kegiatan yang dilakukan sehingga lebih dipahami oleh peserta dalam acara Pengabdian Kepada Masyarakat, tata kelola terhadap pemerintahan Gampong Paya Terbang belum dikembangkan sehingga belum maksimal maka yang perlu harus sering mengikuti kegiatan yang mampu mendapatkan proses pengetahuan tentang Governance atau tata kelola pemerintahan di Gampong Paya Terbang. Berikut sikap dan aspek kegiatan dalam kegiatan PKM seperti tujuan tentang kegiatan Penelitian dan pengabdian.

Proses yang paling penting adalah hasil dari kegiatan ini dapat memberikan aspek yang baik dalam tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbang lebih maju dan berkembang dalam berbagai aspek kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan secara umum. Maka harus ada sinergi antara dengan, Kampus bisa melakukan trobosan serta saling bertukar informasi yang belum diketahui. Dalam aspek pengetahuan para aparat pemerintahan setelah selesai maka mereka kan memahami teknik tata kelola kampong. Dari sisi keahlian tim penelitian memberi gambaran bahwa peserta pelatihan. Dampak yang paling penting adalah ketika dalam tata kelola pemerintahan akan ada pola penyelenggaraan yang efisiensi dan akuntabilitas sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang maju dan baik.

4. Kesimpulan

Kegiatan yang dilaksanakan pada pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang benar-benar mewujudkan konsep *good governance* di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas aparat gampong ini memberi manfaat yang dirasakan oleh aparat pemerintah Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara serta manfaatnya terkait dengan tata kelola pemerintahan Gampong. Pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparat gampong dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan gampong yang efisien dan akuntabel di Gampong Paya Terbang. Pelatihan yang dilakukan di Gampong Paya Terbang, jika berhasil akan menjadi sebuah percontohan bagi gampong-gampong lainnya yang ada di kawasan kecamatan Samudera kabupaten Aceh Utara sehingga lebih efisien dan Akuntabel dalam aspek tata kelola pemerintahan Gampong. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tentu menjadi sebuah penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Gampong Paya Terbang terkait dengan pola tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh aparat gampong yang efisien sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selanjutnya masyarakat juga memberikan dukungan atas kegiatan pengabdian ini supaya kinerja aparat dalam tata kelola pemerintahan Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara bisa berjalan maksimal. Kerjasama yang telah berlangsung antara ketua tim pelaksana kegiatan pengabdian dengan mitra yaitu Keuchik Gampong Paya Terbang akan dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.

REFERENCE

- Agung, K. (2005). *Transformasi pelayanan publik*. Pembaharuan.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Atiek Septi, W., & Ratminto. (2012). *Manajemen pelayanan*. Pustaka Pelajar.
- Bobby, R., Rasyidin, Teuku, M., & Zulhilmi. (2021). Pengelolaan Wisata Halal di Situs Guha Jepang Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe Aceh. *IComSE*, 2(1), 1–23.
- Dwiyanto, I. (2018). *Kebijakan Publik berbasis dynamic Policy Analisy*. Gava Media.
- Isnaeni, A. D. (2021). *Model Pelayanan Administrasi Kependudukan Loket Desa Bebas Calo*. 1–15.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Praktik* (Edisi Ke 1). Rajawali Pers.
- Norman, N. A., Razak, A. R., & Kasmad, R. (2020). *Adaptive Governance Dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Mamuju. 1*. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Rahman, B., Akmal, M., Rasyidin, Muzaffarsyah, T., Zulhilmi, & Rahman, D. A. (2022). Pelatihan Pelayanan Administrasi Perkantoran Menuju Gampong Yang Good Governance di Gampong Keude Jirat Manyang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. *IComSE*, 3(1).
- Sabaruddin, A. (2015). *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi*. Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. (2012). *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Ilham Jaya.
- Simamora, H. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sekolah Tinggi YKPN.
- Zulhilmi, Teuku, M., Bobby, R., Senjaya, B., & Pratiwi, O. C. (2021). Menelusik Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia. In *Book series: Demokrasi dan Otonomi Daerah Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal* (pp. 161–179). Unsyiah Press.
- Agung, K. (2005). *Transformasi pelayanan publik*. Pembaharuan.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Atiek Septi, W., & Ratminto. (2012). *Manajemen pelayanan*. Pustaka Pelajar.
- Bobby, R., Rasyidin, Teuku, M., & Zulhilmi. (2021). Pengelolaan Wisata Halal di Situs Guha Jepang Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe Aceh. *IComSE*, 2(1), 1–23.
- Dwiyanto, I. (2018). *Kebijakan Publik berbasis dynamic Policy Analisy*. Gava Media.
- Isnaeni, A. D. (2021). *Model Pelayanan Administrasi Kependudukan Loket Desa Bebas Calo*. 1–15.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Praktik* (Edisi Ke 1). Rajawali Pers.
- Norman, N. A., Razak, A. R., & Kasmad, R. (2020). *Adaptive Governance Dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Mamuju. 1*. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>

- Rahman, B., Akmal, M., Rasyidin, Muzaffarsyah, T., Zuhilmi, & Rahman, D. A. (2022). Pelatihan Pelayanan Administrasi Perkantoran Menuju Gampong Yang Good Governance di Gampong Keude Jirat Manyang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. *IComSE*, 3(1).
- Sabaruddin, A. (2015). *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi*. Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. (2012). *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Ilham Jaya.
- Simamora, H. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sekolah Tinggi YKPN.
- Zuhilmi, Teuku, M., Bobby, R., Senjaya, B., & Pratiwi, O. C. (2021). Menelisik Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia. In *Book series: Demokrasi dan Otonomi Daerah Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal* (pp. 161–179). Unsyiah Press.